

**BAB IV**

**PARADIGMA ALTERNATIF**

**MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

**PERSPEKTIF PROF. DR. AZYUMARDI AZRA M.A**

**A. Sejarah Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia**

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak individu maupun kelompok antara mubaligh dengan penduduk pribumi. Setelah komunitas Muslim terbentuk di suatu daerah, mereka membangun masjid sebagai tempat peribadatan dan sentral pendidikan, disamping rumah para mubaligh. Setelah itu muncullah lembaga pendidikan lainnya seperti surau dan pesantren. Di tempat inilah umat Muslim Indonesia pertama kali mendapatkan pendidikan ke-Islaman.<sup>1</sup>

Inti dari materi pendidikan Islam pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu keagamaan yang dikonsentrasikan pada pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ini menjadi tolak ukur tinggi rendahnya pemahaman keagamaan seseorang.

Pada awal abad XX M, mulai berhembus ide-ide modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Ide ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan Islam yang ada pada saat itu, terutama aspek materi, sudah ada

---

<sup>1</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 145-146

keinginan untuk memasukkan materi pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan dari aspek metode tidak lagi hanya menggunakan metode srogan, hafalan dan wetonan, tetapi adanya penggunaan metode-metode baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari segi sistem, mulai ada keinginan yang sangat kuat untuk merubah sistem halaqah ke sistem klasikal. Sedangkan aspek manajemen adalah penerapan manajemen pendidikan sekolah.

Sejarah modernisasi pendidikan Islam di Indonesia juga mencatat proses cikal bakal (sejarah) berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia :

#### **1. Awal Munculnya Ide Pendirian Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.**

Ide mendirikan perguruan tinggi Islam merupakan salah satu mata rantai sejarah perjuangan umat Islam Indonesia sejak awal abad XX. Ide itu dimulai dari kesadaran kolektif umat Islam di tanah air yang muncul pada perempat pertama abad XX yang mengukuhkan pentingnya perbaikan pendidikan Islam. Wujud konkrit dari kesadaran itu tampak pada pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu, seperti: Jam'iyat al-Khayrat (1905) di Jakarta, Sarekat Islam (1912) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1915) di Jakarta, Persatuan Umat Islam (1917) di Majalengka, Persis (1923) di Bandung, dan Nahdlatul Ulama (1926) di Surabaya. Meskipun tidak seragam dalam menerapkan pembaharuan, organisasi-organisasi Islam ini secara umum memperkenalkan sistem pendidikan yang baru di lingkungan masing-masing.

Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam pada saat itu bisa dilihat dalam empat level. Pertama, level kelembagaan; yaitu pembaharuan atau perubahan kelembagaan pendidikan Islam, baik dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada maupun pendirian lembaga pendidikan Islam yang baru. Kedua, substansi isi (content) kurikulumnya; yaitu dari pengajaran ilmu-ilmu agama bergeser dengan memperkenalkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. Ketiga, aspek metodologis, yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama itu diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan. Keempat; dari segi fungsi; yakni secara tradisional fungsi pendidikan Islam meliputi: transfer ilmu-ilmu keislaman (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic traditions*), dan melahirkan ulama (*reproduction of ulama*), dengan pembaharuan yang terjadi di tubuh lembaga pendidikan Islam, fungsi ini juga mengalami perkembangan.

Pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi Islam di atas memberikan semangat umat Islam untuk mengusahakan berdirinya lembaga pendidikan tinggi yang bercorak keagamaan. Gagasan ini semakin kuat karena sampai tahun 1930-an telah berdiri 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah Belanda, yaitu Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik)—kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB)—yang berdiri di Bandung pada tahun 1920, Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) yang berdiri di Jakarta pada

tahun 1924, dan Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1927. Lembaga-lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka Politik Etis di mana hanya anak-anak elit priyayi saja yang mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalamnya. Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi tersebut bagi rakyat Indonesia umumnya amat kecil, apalagi bagi umat Islam. Dengan kenyataan ini, amat dipahami jika umat Islam berhasrat untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang akan menampung anak-anak kaum muslimin dari sekolah rendah dan menjadi ajang mobilitas bagi mereka. Tujuannya tidak hanya untuk menampung calon-calon mahasiswa dari kalangan pribumi muslim, melainkan juga untuk menegaskan corak keislaman yang membedakannya dari corak pendidikan kolonial yang ‘netral’ terhadap pendidikan agama.

Sejak tahun 1930-an, gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam semakin santer dibicarakan. Pada tahun 1938, Dr. Satiman Wirjosandjojo melalui majalah Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun IV mencetuskan ide untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (Pesantren Luhur) sebagai tempat mendidik muballigh yang cakap dan berpengetahuan luas. Ide ini disusul dengan pemberitaan majalah AID Nomor 128 tanggal 12 Mei 1938 yang memberitakan bahwa telah diadakan permusyawaratan antara 3 (tiga) Badan Pendiri Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Pada bulan Juli 1938, M. Natsir menulis artikel yang dipublikasikan dalam Pandji

Islam berjudul "Menuju Koordinasi Perguruan-perguruan Islam", ditulis sebagai tanggapan terhadap gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurut Natsir, perlu ada koordinasi antara perguruan-perguruan Islam tingkat menengah dan perguruan tinggi yang akan didirikan untuk menyatukan visi, misi, dan wawasan.

Sampai dengan akhir masa penjajahan Belanda, ide pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut belum benar-benar bisa terealisasikan. Di Solo, sempat berdiri Islamische Medelbare School (IMS) namun perguruan itu hanya dapat hidup sampai tahun 1941 dan bubar (ditutup) karena pecahnya Perang Dunia II. Di luar Jawa, di Padang, pada tahun 1940 juga berdiri Sekolah Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), akan tetapi nasibnya sama dengan yang di Solo. Ketika tentara Jepang menguasai kota Padang, Sekolah Islam Tinggi dibubarkan karena tidak diijinkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya ide untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam ini akhirnya menjadi agenda pembicaraan dalam forum Kongres Al-Islam II Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1939, yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam anggota MIAI.

Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 (tiga) program, yaitu:

1. Membangun sebuah Masjid Agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia;
2. Mendirikan sebuah universitas Islam, dan

3. Membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat (Bait al-Mal) untuk menerima zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pendirian Universitas Islam yang telah dicoba realisasikan oleh organisasi-organisasi Islam pada akhir masa pemerintahan Belanda, hanya menjadi janji yang sering dikemukakan oleh Jepang kepada umat Islam sejak minggu-minggu pertama pendudukan Jepang di Jawa, namun kenyataannya selalu diulur-ulur. Tuntutan MIAI tidak pernah berhasil sampai organisasi ini dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 1943. Baru nanti beberapa minggu sebelum penyerahan Jepang, sebuah universitas Islam—dengan nama Sekolah Tinggi Islam—berhasil didirikan atas usaha Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), organisasi federasi Islam baru yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti MIAI.<sup>2</sup>

## **2. Pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI)**

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Keputusan Masyumi ini merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dicoba oleh MIAI sejak awal tahun 1943. Berbeda dengan MIAI yang mendapatkan tekanan dari pihak Jepang, Masyumi lebih beruntung memiliki kedekatan dengan Jepang. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada bulan April 1945 Masyumi

---

<sup>2</sup> Pusat Komputer & Sistem Informasi Joomla Templates . JoomlaShack.com (c) 2007

menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi), kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah (dalam hal ini Shumubu yang menjalankan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan Islam).

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori Masyumi pada bulan April tersebut betul-betul berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana pendirian STI, yaitu dengan dibentuknya Panitia Perencana STI di bawah pimpinan Moh. Hatta. Panitia inilah yang mengerjakan rencana pelaksanaannya, seperti menyusun Peraturan Umum, Peraturan Rumah Tangga, Susunan Badan Wakaf, Dewan Pengurus, dan Senat STI. Untuk Dewan Pengurus/Kuratornya, Moh Hatta ditunjuk sebagai Ketua dengan M. Natsir sebagai Sekretarisnya. Untuk Senat STI, A. Kahar Muzakkir ditunjuk sebagai Rektor Magnificus dengan anggota-anggotanya: Mas Mansur, Dr. Slamet Imam Santoso, Moh. Yamin, Kasman Singodimedjo, Mr. Soenarjo, dan Zain Djambek. Akhirnya STI ini dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 di saat Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor Imigrasi Gondangdia Jakarta.

Pada awalnya, STI didirikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang yang telah mempelajari Islam secara meluas dan mendalam, dan telah memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai

seperti dituntut oleh masyarakat dewasa ini;. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian STI yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu kemasyarakatan agar menjadi penyiarnya agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia.

Menilik tujuan STI, jelas bahwa para pemrakarsanya yang terdiri dari tokoh-tokoh pembaharu, politisi, ulama, dan intelektual muslim, berupaya mencari bentuk perpaduan pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama yang pakar dalam dua bidang sekaligus, mempelajari Islam secara meluas dan mendalam dan juga memiliki kualifikasi ilmu-ilmu sekuler yang memadai. Berdirinya STI merupakan penjelmaan dari pikiran yang jernih dan pandangan yang jauh ke depan dari pemimpin-pemimpin Indonesia tentang corak perguruan Islam yang harus ada.

Empat puluh (40) hari setelah STI dibuka secara resmi, terjadilah peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Keterlibatan tokoh-tokoh pendiri STI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (dalam BPUPKI) telah menjadikan mereka sebagai *the founding fathers* bagi republik ini. Para pendiri STI banyak yang kemudian menjadi pemimpin republik yang baru lahir ini, misalnya sebagai wakil presiden, perdana menteri, dan menteri.

Beberapa bulan setelah kemerdekaan, pasukan Sekutu (NICA) datang ke Indonesia dengan membawa kepentingan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, menggantikan Jepang. Terjadilah bentrokan senjata antara pasukan sekutu dengan rakyat Indonesia. Gedung-gedung di Jakarta dapat dikuasai oleh Sekutu dan situasi kota Jakarta menjadi tidak aman. Situasi inilah yang akhirnya memaksa Pemerintah Negara RI mengambil langkah untuk hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Hijrahnya Pemerintah RI ke Yogyakarta Ibu Kota RI kedua ini sangat mempengaruhi kelangsungan STI, karena suasana perang di Jakarta tidak menjamin kelancaran perkuliahan, di samping banyak sekali dosen-dosen dan pengurus STI yang ikut pindah ke Yogyakarta sebagai pejabat tinggi negara. Satu-satunya jalan untuk sementara STI di Jakarta ditutup dan ikut hijrah ke Yogyakarta.

Pada tanggal 10 April 1946 dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (yang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus STI) serta pejabat-pejabat tinggi negara lainnya baik sipil maupun militer. Upacara pembukaan berlangsung di Ndalem Pengulon Yogyakarta yang diisi antara lain dengan penyampaian 2 (dua) pidato, yaitu Pidato Pembukaan STI berjudul Sifat Sekolah Tinggi Islam oleh Mohammad Hatta dan Kuliah Umum tentang Ilmu Tauhid yang disampaikan oleh K.H.R. Hadjid.

Kahar Muzakir tetap menjadi Rektor meskipun terjadi perubahan pada kelengkapan anggota Senat STI. Mohammad Hatta dalam pidatonya yang biasa disebut sebagai Memorandum Hatta menyebutkan antara lain:

*“Demikianlah, dalam lingkungan STI bisa diselenggarakan pengajaran agama yang berdasarkan pengetahuan tentang Filsafat, Sejarah, dan Sosiologi. Agama dan Filsafat memperluas kepercayaan dan memperhalus perasaan agama. ... Agama dan Sejarah memperluas pandangan agama. ... Agama dan Sosiologi mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin. ...”*

Dengan keterangan tersebut nyatalah bahwa wujud STI ialah membentuk ulama yang berpengetahuan dalam dan berpendidikan luas serta mempunyai semangat yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat. Di STI itu akan bertemu AGAMA dengan ILMU dalam suasana kerjasama untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan.

Mengacu pada Memorandum Hatta tersebut, dapat diketahui ke mana arah pengembangan Ilmu yang hendak dicapai oleh STI lewat rencana pelajarannya. Bisa dikatakan bahwa basic philosophy pengembangan ilmunya adalah integralistik, tidak dikotomis antara ilmu agama dan umum.

### **3. Dari STI menjadi UII**

Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan para tokoh muslim timbul pemikiran untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi STI yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk mengubah STI menjadi sebuah universitas.

Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI dan dalam sidangnya pada bulan Februari 1948 sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Peresmian UII dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab 1367 (10 Maret 1948) di Ndalem Kepatihan Yogyakarta bersamaan dengan Dies Natalis STI ke-3.

Pada saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, UII terpaksa ditutup untuk sementara. Para mahasiswa, pengurus, bahkan guru besarnya ikut bergabung dalam perang melawan agresi Belanda. Dalam suasana perang, fungsionaris UII, terutama A. Kahar Muzakkir sempat mengadakan upacara Dies Natalis UII IV, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1368 (April 1949). Upacara itu tidak dilaksanakan di Kampus, melainkan jauh dari kota, di Desa Tegalayang, Srandakan, Bantul. Para pembesar sipil dan militer serta masyarakat memeriahkan upacara tersebut. Pada saat itu, A. Kahar Muzakkir (Rektor Magnificus) menyampaikan pidato tentang Dasar-dasar Sosialisme dalam Islam. Setelah keamanan kota berangsur-angsur pulih, sementara perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Belanda terus diupayakan, pada bulan September 1949 UII kembali membuka kantor sekretariatnya di Kauman Yogyakarta dan sejak Nopember 1949 perkuliahan berjalan normal.

Pada tanggal 22 Januari 1950 sejumlah pemimpin Islam dan para ulama yang dipelopori oleh Moh. Adnan, Imam Ghazali, dan Tirtodiningrat mendirikan Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) di Solo. Setahun

kemudian, tepatnya pada 20 Pebruari 1951, terjadi kesepakatan antara pimpinan UII dan pimpinan PTII untuk menyatukan kedua lembaga itu dengan nama University Islam Indonesia (kemudian diganti Universitas Islam Indonesia, UII) yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.

Dengan perubahan STI menjadi UII, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama seperti Teknik, Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran meskipun tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama atau semangat keagamaan.

Perubahan orientasi ini di antaranya dilatarbelakangi oleh kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 yang berkembang menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejak 19 Desember 1949 memperoleh corak nasionalis. Perubahan orientasi tersebut pada dasarnya tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI, yaitu: memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang universum mencakup berbagai ilmu.<sup>3</sup>

#### **4. Dari Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN**

Sebagai wujud penghargaan terhadap Yogyakarta sebagai Kota Revolusi dan Ibukota Negara Kedua, Pemerintah RI menetapkan Yogyakarta sebagai Kota Universitas. Saat itu di Yogyakarta ada 2 (dua) universitas, yaitu UII yang dikelola oleh kelompok Islam dan UGM yang dikelola oleh kelompok

---

<sup>3</sup> <http://www.uin-suka.info/projectportal>

nasionalis. Pemerintah RI menawarkan kepada pengelola UGM untuk menegerikan universitas itu. Tawaran tersebut diterima, dan penegeriannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1950, selanjutnya UGM berada di bawah pengawasan Kementerian PP&K (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

Tawaran yang sama juga diajukan oleh Pemerintah RI kepada pengelola UII, namun tidak langsung disetujui. Pengelola UII dapat menerima tawaran tersebut namun dengan syarat pengawasannya harus berada di bawah Kementerian Agama. Dengan syarat ini, hanya ada satu fakultas yang bisa dinegerikan, yaitu Fakultas Agama, sementara ketiga fakultas lainnya tetap berstatus swasta dan tetap dikelola oleh pihak UII.

Penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI. Peresmian PTAIN dilaksanakan pada tanggal 26 September 1951 dihadiri oleh Menteri Agama RI A. Wahid Hasyim yang menyampaikan pidato berjudul Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Penyelenggaraan PTAIN selanjutnya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri PP&K tertanggal 21 Oktober 1951 yang ditandatangani oleh A. Wahid Hasyim dan Mr. Wongsonegoro.

## **5. Dari PTAIN Menjadi IAIN**

Walaupun PTAIN telah berdiri, dan enam tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1957, juga berdiri ADIA (Akademik Dinas Ilmu Agama), umat Islam belum sepenuhnya puas dan masih menginginkan bentuk lembaga pendidikan tinggi Islam yang lebih mapan. Hal ini dikarenakan melihat kenyataan bahwa sejak berdirinya, PTAIN mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi jumlah mahasiswanya maupun dari segi keluasan bidang kajian ilmu agama Islam yang dipelajari. Perkembangan ini menuntut penanganan yang serius menyangkut status kelembagaan, penambahan gedung beserta fasilitas pendukung lainnya, dan perluasan bidang kajian ilmu agama Islam.

Muncullah keinginan dari tokoh-tokoh Islam untuk mengembangkan, meningkatkan, dan meluaskan status lembaga pendidikan tinggi Islam yang sudah ada, yaitu PTAIN dan ADIA. PTAIN secara kelembagaan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama sebagaimana permintaan dari pengelola UII dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri PP&K. Peraturan bersama ini terjadi karena menurut konsensus yang berhak mengelola universitas dan fakultas-fakultasnya adalah Kementerian PP&K, sementara Kementerian Agama hanya boleh mendirikan Akademi Dinas seperti ADIA.

Dari sini timbul pemikiran untuk mengadakan penggabungan terhadap kedua lembaga tersebut ke dalam suatu wadah lembaga berbentuk institut RUU Perguruan Tinggi pada saat itu hanya mengenal tiga macam bentuk

perguruan tinggi, yaitu: universitas, institut, dan akademi. Untuk keperluan pengembangan kelembagaan ini, dibentuklah Panitia Khusus yang diketuai oleh R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan 21 anggota lainnya. Tugas utama panitia tersebut adalah mengajukan saran-saran dan usul-usul kepada Menteri Agama berkenaan dengan rencana penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Pada proses berikutnya, serentetan perundingan diadakan antara Menteri PP&K dan Menteri Agama yang akhirnya menghasilkan persetujuan bahwa Kementerian Agama boleh mendirikan suatu perguruan tinggi agama Islam asal tidak bernama universitas Atas persetujuan itulah kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tertanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami' al-Islamiyah al-Hukumiyah dengan melebur PTAIN (yang didirikan berdasarkan PP Nomor 34/1950) dan ADIA (yang didirikan dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 1/1957). Mulai saat itu Kementerian Agama memiliki kewenangan independen (lepas dari Kementerian PP&K) untuk mengawasi dan mengurus IAIN.

Pembukaan IAIN diresmikan oleh Menteri Agama Wahib Wahab di Gedung Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1960. Hadir dalam peresmian itu Menteri Agama beserta rombongan, para utusan Kedutaan Negara-negara Islam di Jakarta, para wakil organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, para pimpinan universitas, para dosen dan mahasiswa

PTAIN dan ADIA. PTAIN Yogyakarta diubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah, sedangkan ADIA Jakarta menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Dari kedua tempat inilah Yogyakarta dan Jakarta IAIN dengan cepat berkembang di berbagai daerah di Nusantara beserta fakultas-fakultas cabang yang berada di kota-kota sekitarnya.

Pada tahun 1963, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Menurut peraturan yang baru ini, sekurang-kurangnya 3 (tiga) fakultas dapat digabung menjadi satu IAIN tersendiri dengan Keputusan Menteri Agama. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Menteri Agama kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Pebruari 1963 tentang pemisahan IAIN menjadi dua institut yang berdiri sendiri. Yang pertama berpusat di Yogyakarta dengan 3 (tiga) fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Tarbiyah, sementara yang kedua berpusat di Jakarta.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 tertanggal 1 Juli 1965, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami al-Islamiyah al-Hukumiyah di Yogyakarta diberi nama Sunan Kalijaga nama salah seorang dari Wali Songo (Sembilan Wali) tokoh-tokoh termasyhur penyebar agama Islam di wilayah Nusantara, dan Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta

sehingga selanjutnya IAIN di Yogyakarta tersebut dikenal dengan nama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **6. Cikal Bakal PTAI Di Indonesia**

Bermula dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sampai dengan tahun 1972 telah berdiri 13 IAIN induk yang tersebar di 13 Kota Propinsi dengan cabang-cabangnya di kota-kota sekitarnya. Pada tahun yang sama, Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh A. Mukti Ali mengeluarkan kebijakan rasionalisasi fakultas-fakultas cabang yang tidak memenuhi syarat, diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972. Dari 104 fakultas pada 13 IAIN, 62 fakultas cabang yang berada di Kota Kabupaten terkena rasionalisasi dengan phasing out system untuk selanjutnya disalurkan ke induknya di Kota Propinsi. Dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973, jumlah IAIN bertambah menjadi 14 IAIN.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1997, ada 33 buah fakultas cabang yang berada di beberapa Kota Kabupaten dikembangkan menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri).

Pada tahun 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikembangkan menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, disusul pada tahun 2004 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang dikembangkan menjadi UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang.

Beberapa STAIN juga telah berkembang menjadi IAIN (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, IAIN Mataram, dan IAIN Sultan Amai

Gorontalo) dan berdiri pula beberapa STAIN yang baru (STAIN Malikul Saleh Lokseumawe NAD, STAIN Babel Bangka, dan STAIN Al-Fatah Jayapura). Sampai dengan Tahun 2004, menurut catatan Statistik Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI ada 3 (tiga) UIN, 15 (lima belas) IAIN, dan 32 (tiga puluh dua) STAIN. Ketika laporan ini disusun, 3 (tiga) IAIN telah berubah menjadi UIN, yaitu: UIN Sultan Syarif Qasim Riau, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Alauddin Makassar.<sup>4</sup>

## **B. Problematika Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia**

Pada perkembangan pendidikan Islam di Indonesia seperti di anak tirikan baik dari segi dana, maupun kelembagaan. Di satu sisi ada pendidikan umum di bawah Dinas Pendidikan yang cukup di beri perhatian lebih oleh pemerintah karena di anggap mewakili generasi pembangunan pada suatu bangsa, sedangkan pendidikan Islam yang di bawah Departemen Agama dari sokongan dana dan kelembagaan kurang begitu terjamin.

Hal ini terlihat ketika di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember terdapat suatu permasalahan, yaitu salah satu program studi di jurusan Tarbiyah yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah(PGMI) tidak mempunyai surat ijin beroperasi, banyak mahasiswanya yang terlantar, sampai-sampai mahasiswa sendiri yang pergi ke Departemen Agama Pusat, dan di sana pun mereka tidak mendapat suatu kepastian.

---

<sup>4</sup> <http://www.uin-suka.info/projectportal>.

Banyak usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan dan ulama Para ilmuwan dan ulama serta teknokrat sepakat bahwa pendidikan agama di tanah air kita harus di sukseskan semaksimal mungkin sejalan dengan lajunya pembangunan nasional.

Namun, dalam pelaksanaan program pendidikan agama di berbagai sekolah di Indonesia, belum berjalan seperti yang di harapkan, karena berbagai kendala dalam bidang kemampuan pelaksanaan metoder, sarana fisik dan non fisik, di samping suasana lingkungan pendidikan yang kurang menunjang suksesnya pendidikan mental-spiritual dan moral. Yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

#### 1. Faktor Eksternal

- a. Timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari pentingnya pendidikan agama.
- b. Situasi lingkungan sekitar sekolah di pengaruhi godaan-godaan setan dalam berbagai macam bentuknya, seperti: judi, dan tontonan yang menyenangkan nafsu.
- c. Serbuan dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi dari luar negeri semakim melunturkan perasaan religius dan melebarkam kesenjangan antara nilai tradisional dengan nilai rasional teknologis.

#### 2. Faktor Internal Sekolah

- a. Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan atau jabatan guru yang di sandangnya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir, tanpa ada rasa dedikasi sesuai tuntutan pendidikan.

- b. Hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal, tanpa berlanjut dalam situasi informal di luar kelas.
- c. Pendekatan metodologi guru masih terpaku pada orientasi tradisional sehingga tidak mampu menarik minat murid pada pelajaran agama.

Belum mantapnya landasan perundangan yang menjadi dasar terpijaknya pengelolaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam.<sup>5</sup>

Menurut Intelektual Muslim Indonesia Prof Dr Zamakhsari Dhofir, jumlah pesantren telah melonjak dari 4200 pada 1980 menjadi lebih dari 16 ribu pada 2006. Demikian pula jumlah madrasah yang pada 1980 baru sebanyak 26 ribu, kini pada 2006 telah mencapai 40 ribu. “Lonjakan jumlah pesantren dan madrasah justru spektakuler sejak 1998, karena dalam 8 tahun terakhir pesantren meningkat dari sekitar 9.700 menjadi hampir 16 ribu”.

Namun Zamakhsari menyadari, sebagian akar tradisi pendidikan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara akar tunjangnya semakin lemah kekuatannya untuk menanggung beban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan umat Islam Asia Tenggara yang kian dituntut untuk memainkan peran dalam percaturan peradaban dunia. Kedua, mayoritas peserta didik di pesantren dan madrasah yang jumlahnya sekitar 8 juta hampir 80 persen berasal dari keluarga miskin pedesaan. “Bahkan dari sensus yang dilakukan Departemen Agama pada 2004, lebih dari 20 persen

---

<sup>5</sup> WordPress.com

orang tua murid dan santri berpenghasilan di bawah 200 ribu,” papar Pengasuh Pesantren Sains Al-Quran, Wonosobo, Jawa Tengah ini.

Selain itu, mantan rektor IAIN Semarang ini, dukungan dana penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah dan warga Muslim yang tergolong kaya belum memadai bagi upaya meningkatkan mutu pendidikan pesantren dan madrasah. Padahal, kata dia, warga Muslim memiliki ribuan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sebenarnya siap untuk dikembangkan menjadi lembaga-lembaga pendidikan modern dengan biaya yang jauh lebih murah daripada membangun yang baru.

Menurut Zamakhsari, tak ada alasan sama, pesantren tak mampu atau tak mau mengembangkan universitas bagi upaya meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat Muslim. “Yang mereka perlukan adalah akses ke kekuasaan pemegang kebijakan yang memiliki kemauan dan menyediakan educational resources yang mereka perlukan untuk memajukan lembaga-lembaga mereka,” jelasnya.

Perbincangan tentang Islamisasi Ilmu dan teknologi bukan tidak bermanfaat. Ia dapat merupakan langkah awal untuk membangun paradigma lebih “Islami” bukan hanya pada tingkat masyarakat muslim tetapi juga pada tingkat global. Ini seharusnya tidak membuat kaum muslim terutama kalangan ahli dan terpelajar mengabaikan masalah-masalah berat yang terdapat pada tingkat praktis yang tetap tidak atau belum terpecahkan. Diantara masalah-masalah pokok itu adalah :

1. Lemahnya Masyarakat Ilmiah.

Salah satu prasyarat pokok pengembangan riset ilmiah dalam masyarakat manapun adalah terdapatnya jumlah minimal ilmuwan (scientists) dan tenaga ahli (experts) yang mampu melakukan penelitian ilmiah yang kontinyu dan terarah. Jika masyarakat ilmiah tidak mencapai jumlah minimal itu, maka riset dan pengembangan ilmu tidak akan berjalan baik. Di negara-negara maju sekalipun terdapat hanya sekitar 12 persen dari seluruh ilmuwan yang mampu melakukan riset dan pengembangan. Mereka ini menjadi tulang punggung masyarakat ilmiah dan mereka memerlukan lapisan kedua ilmuwan yang mendukung mereka. Sering terjadi lapisan kedua ini tidak tersedia atau sangat lemah dan tidak memadai.

Penciptaan masyarakat ilmiah yang mampu melakukan riset dan pengembangan memang tergantung terutama pada pertumbuhan sumber daya manusia, dan pada perumusan kebijakan-kebijakan ilmiah yang memungkinkan bagi lebih banyak ilmuwan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian mereka. Sejauh menyangkut sumber daya ini, kita melihat bahwa proporsi mahasiswa di wilayah dunia muslim mana pun yang memasuki bisang-bisang sains masih sangat terbatas. Sampai saat ini mayoritas mahasiswa muslim lebih berminat pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial daripada sains.

## 2. Kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional

Hampir seluruh negara muslim tidak mempunyai tidak mempunyai kebijakan (policy) dan perencanaan nasional yang jelas, menyeluruh, terpadu

dan terarah untuk pengembangan sains. Bahkan sains, dalam banyak kasus merupakan bidang yang paling terlantar dari kebijaksanaan nasional yang terlalu bertitik tekan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini kontras dengan negara-negara maju, yang memberikan perhatian khusus kepada kebijaksanaan sains bahkan melebihi kebijakan luar negeri atau militer, sebab kegagalan mengembangkan riset nasional dalam berbagai bidang ilmu, baik eksakta maupun sosial semacam fisika, matematika, kimia, biologi, sosiologi, sejarah, antropologi dan lain-lain dapat menghambat perkembangan secara menyeluruh di masa depan.

Memang di banyak negara Islam terdapat badan khusus yang merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sains dan teknologi, semacam BPPT di Indonesia. Tetapi kebijaksanaan yang dimunculkan badan sains sering dipandang tidak selaras dengan kebijaksanaan dan perencanaan ekonomi. Padahal adalah keliru menganggap perencanaan sains sebagai penunjang atau pelengkap belaka dari perencanaan ekonomi. Oleh karena itu perlu dialog dan koordinasi yang kontinyu antara badan sains dengan bidang ekonomi, sehingga perencanaan yang menyeluruh dapat dirumuskan.

### 3. Tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah

Hampir di seluruh negara Muslim, anggaran untuk pengembangan ilmu dan penelitian ilmiah sangat kecil dan tidak menduduki tempat signifikan dalam anggaran nasional. Sebaliknya anggaran militer pada umumnya mengambil bagian yang cukup besar bagi anggaran nasional secara

keseluruhan. Di negara-negara Muslim pertumbuhan anggaran untuk riset dan pengembangan sains hanya berkisar antara 0,1 sampai 0,3 persen dari GNP. Ini kontras dengan negara-negara maju, yang terus meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pengembangan sains, sebagian negara-negara ini bahkan menganggarkan lebih 4 persen dari total GNP.

Dalam logika sederhana, untuk mengatasi ketertinggalan mereka, negara-negara muslim harus mengeluarkan anggaran yang jauh melebihi jumlah yang dikeluarkan negara-negara maju. Tetapi, ini sulit mereka lakukan, sebab negara-negara ini pada umumnya berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Bahkan tidak jarang, sementara negara muslim sangat dependen pada negara-negara maju dalam soal anggaran belanja.

4. Kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah

Negara-negara muslim dalam kebijaksanaan pembangunan sangat mengorientasikan diri pada pembangunan ekonomi dengan titik tekan pada pertumbuhan. karenanya tidak heran kalau yang memegang kendali perumusan kebijakan pembangunan adalah ekonom, yang sering kurang mempunyai minat terhadap signifikansi pengembangan dan penelitian sains dan teknologi. Kaum ekonom untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih senang mengimpor teknologi yang “siap pakai” ketimbang mengembangkannya sendiri di dalam negeri. Mereka lebih suka mendatangkan keahlian (expertise), ilmuwan, peralatan, buku-buku sains dari luar negeri. Argumen yang sering diajukan

untuk menunjang kebijakan ini adalah bahwa hal itu juga akan mempercepat proses alih sains, teknologi dan keahlian. Tetapi transfer yang diharapkan tidak berlangsung mudah dan cepat, karena adanya berbagai faktor yang menghalanginya. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan, bahwa dengan menempuh dengan jalan seperti ini, sulit diharapkan terjadi kemajuan-kemajuan yang riil dan berarti dalam pengembangan sains dasar (fisika, matematika, kimia, biologi) ilmu-ilmu terapan (yang menghasilkan teknologi) dan bahkan ilmu-ilmu sosial.

Pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sains menuntut adanya assessment tentang sumber daya material dan sumber daya manusia yang tersedia di setiap negara muslim bersangkutan. Tegasnya, diperlukan proyek-proyek besar dalam statistik, demografi, sosiologi, sejarah (terutama sosial budaya), ekonomi, biologi, hidrologi, geodesi dan ilmu-ilmu lain. Pemanfaatan kedua sumber daya tadi tidak lebih jauh lagi menghendaki serangkaian proyek-proyek riset yang berkesinambungan guna mengkaji karakteristik sumber-sumber daya tersebut untuk selanjutnya merumuskan metode-metode terbaik dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, pembangunan negara-negara muslim memerlukan penyediaan hasil-hasil riset saintifik secara konstan. Ketergantungan kepada pengimporan tenaga ahli dan spesialis asing sepenuhnya tidak dapat diterima, baik dalam kerangka pengembangan ilmu-ilmu maupun dalam kaca mata politis dan ekonomis.

5. Kurang memadainya fasilitas perpustakaan, dokumentasi dan pusat informasi

Tidak perlu dipersoalkan lagi bahwa riset saintifik memerlukan penyediaan informasi secara konstan dan lengkap. Tetapi fasilitas-fasilitas yang dimiliki negara-negara muslim dalam hal ini sangat terbatas, ini salah satu kelemahan pokok yang menghalangi pengembangan dan riset saintifik. Jumlah buku-buku sains (fisika dan alam) yang tersedia amat sedikit. Kebanyakan peneliti di dunia Muslim tidak memiliki akses kepada jurnal-jurnal ilmiah, dan karenanya tidak mempunyai bahan-bahan untuk mengikuti perkembangan keilmuan dalam bidang mereka masing-masing, walaupun buku-buku jurnal itu ada, kebanyakan mereka hanya ditulis dalam bahasa asing, yang sering tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh peneliti muslim. Ini membatasi mereka kepada informasi.

#### 6. Isolasi Ilmuwan

Situasi lain yang menghambat pengembangan sains dan bahkan dapat melunturkan kemampuan saintifik di negara-negara muslim adalah terisolasinya kaum ilmuwan dari perkembangan ilmu secara global. Mereka hampir tidak pernah atau jarang sekali berinteraksi dengan kaum ilmuwan di negara-negara maju. Padahal setiap ilmuwan agar dapat mengembangkan ilmunya perlu berpartisipasi dalam diskusi-diskusi seminar dan simposium pada tingkat lokal, regional dan internasional. Dia juga perlu menjalin kontak dan hubungan pribadi dengan ilmuwan dan peneliti di negara-negara maju. Juga krusial bagi universitas-universitas dan lembaga-lembaga riset di negara-negara muslim untuk menjalin kerjasama dengan rekan mereka di negara-

negara maju, sehingga pertukaran tenaga ahli dan keahlian dapat dilakuakn. Tetapi kesulitan-kesulitan keuangan sering menjadi hambatan utama untuk melakukan semua ini.

#### 7. Birokrasi, Restriksi dan Kurangnya Insentif

Sains jelas akan lebih berkembang dan bermanfaat bila ditangani dalam atmosfir yang bebas, atau dengan restriksi-restriksi minimal, jaring-jaring birokrasi yang terlalu ketat hanya akan membunuh kreatifitas dan lembaga riset di negara-negara muslim yang sering tidak dapat bergerak banyak karena birokrasi dan restriksi-restriksi yang mencekam. Akibatnya, yang berlangsung adalah kerutinan bukan kreatifitas.

Selain itu ilmuwan di negara-negara muslim tidak mendapat insentif finansial dan moral yang memadai. Akibatnya rasa tanggung jawab sebagai ilmuwan juga tidak bertumbuh. Diperkirakan, hampir 80 persen ilmuwan muslim bermukim di kota-kota besar dan sekitar sepertiga diantara mereka bermigrasi ke negara-negara maju, dengan demikian terjadilah *brain-drain* yang sangat merugikan masyarakat muslim. Lebih jauh lagi dilaporkan sekitar dua pertiga lulusan pertanian malah bermukim di kota, memegang jabatan – jabatan administratif atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan keahlian mereka. Rendahnya insentif finansial dan moral dalam bidang-bidang semacam matematika, fisika dan ilmu-ilmu murni lain mengakibatkan munculnya tendensi yang kuat untuk terjun ke bidang kedokteran dan teknik, yang lebih menjanjikan kemakmuran material.

Demikianlah beberapa masalah pokok yang dihadapi Muslim Indonesia dalam upaya pengembangan sains dan teknologi. Jika negara-negara muslim serius untuk mengatasi ketertinggalanya atau lebih idealistik lagi membangun kembali peradaban Islam, maka niscayalah masalah-masalah diatas perlu segera dipecahkan. Jika tidak reskonstruksi peradaban Islam di masa kini dan mendatang tinggal hanya slogan.<sup>6</sup>

### **C. Paradigma Alternatif Prof. Dr. Azyumardi Azra M.A tentang Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia**

Pada tingkat nasional, respon dunia pendidikan terhadap globalisasi telah menjadi wacana sejak awal 1990-an, dan menemukan momentum melalui perumusan “paradigma baru” pendidikan nasional selaras dengan reformasi nasional berikutan dengan jatuhnya presiden Suharto dari kekuasaanya pada Mei 1998. Dalam rumusan “arah pandangan dasar pendidikan nasional” yang tercakup dalam paradigma baru pendidikan nasional itu dikemukakan 10 kerangka acuan, antara lain: “pendidikan dengan prinsip global. Pendidikan harus mampu berperan dan menyiapkan peserta didik dalam konstalasi masyarakat global. Dalam pendidikan berwawasan global itu “...pada waktu yang sama pendidikan memiliki kewajiban untuk melestarikan karakter nasional. Meski konsep nasional state sudah diragukan dan bahkan global state yang tidak lagi mengenal tanpa

---

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

batas (borderless), karena kemajuan teknologi informasi, pembinaan karakter nasional tetap relevan dan bahkan harus dilakukan.

Pada akhirnya berbagai kecenderungan perkembangan baru pendidikan yang muncul sebagai dampak atau konsekwensi globalisasi mesti diadopsi sistem pendidikan nasional. secara ringkas, kenyataan ini tercermin dalam rumusan paradigma baru pendidikan nasional yang mencakup arah sebagai berikut :

- a) Desentralistik (*otonom*),
- b) Kebijakan yang bottom up,
- c) Orientasi pendidikan holistik untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya (multikulturalisme),
- d) Menjunjung tinggi nilai moral,
- e) Kemanusiaan dan agama,
- f) Kesadaran kreatif,
- g) Produktif,
- h) Kesadaran hukum,
- i) Peningkatan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif,
- j) Dan pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan dunia usaha.

Selanjutnya paradigma baru pendidikan nasional itu menggariskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional, yaitu :

- a) kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain;

- b) Pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial;
- c) Pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa;
- d) Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional;
- e) Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan;
- f) Penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan ;
- g) Perencanaan terpadu secara horizontal (antarsektor) dan vertikal (antar jenjang) ;
- h) Pendidikan berorientasi peserta didik ;
- i) Pendidikan multikultural ;
- j) Pendidikan dengan prespektif global.

Tantangan-tantangan dan masalah-masalah internal pendidikan Islam pascamodernisasi dan tantangan globalisasi pada hari ini dan masa depan, secara umum adalah sebagai berikut :

*Pertama*, jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan. Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak 1970-an dan peluang-peluang baru, seperti disyaratkan dalam paradigma baru pendidikan nasional, seperti yang dikemukakan diatas, kini lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki peluang dan sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan, yang setidaknya-tidaknya kini menyediakan 4 pilihan :

1. Pendidikan yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din*, seperti yang ada dalam tradisi pesantren pada masa pra modernisasi (pesantren salafiyah), dengan kurikulum yang hampir sepenuhnya ilmu agama. Di tengah arus modernisasi pesantren belakangan terdapat kecenderungan sejumlah pesantren untuk mempertahankan atau bahkan kembali kepada karakter salafiahnya.
2. Pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum. Diknas dan Depag, madrasah semula merupakan “pendidikan agama plus umum”, tetapi dengan ekuivalensi seperti digariskan UUSPN 1989 dan UU Sisdiknas 2003 pada dasarnya adalah “sekolah umum berciri agama”.
3. Sekolah Islam “plus” atau “unggulan” yang mengikuti kurikulum diknas, yang pada dasarnya adalah “pendidikan umum plus agama”.
4. Pendidikan ketrampilan (vocational training), apakah yang mengikuti model “STM” atau “MA/SMU ketrampilan.

Keempat jenis pilihan ini dapat dilaksanakan oleh satu lembaga pendidikan Islam tertentu, atau sebagian besar atau secara keseluruhan dalam satu kelembagaan pesantren tertentu (pesantren menjadi semacam “*holding company*”).

Keempat pilihan ini secara implisit mengakomodasi hampir keseluruhan harapan masyarakat secara sekaligus kepada pendidikan Islam. Harapan pertama dan utama adalah agar lembaga-lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan tetap menjalankan peran sangat krusialnya dalam tiga hal pokok :

- Pertama, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*).
- Kedua, pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*).
- Ketiga, reproduksi (calon-calon) ulama (*reproduction of ulama*).

Harapan kedua – yang tidak berarti kurang penting – adalah agar para peserta didik tidak mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum – atau sebaliknya tidak hanya menguasai pengetahuan umum, tetapi juga unggul dalam ilmu agama –dan dengan demikian, dapat melakukan mobilitas pendidikan. Dan harapan ketiga, agar para anak didik dapat memiliki ketrampilan, keahlian atau lifeskills. Khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi –yang pada gilirannya membuat mereka memiliki dasar-dasar “competitive advantage” dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut di alam globalisasi.

Pengembangan “competitive advantage” atau “competitive edge” di dunia pesantren jelas bukanlah hal yang mudah. Pengembangan itu, bukan hanya memerlukan penyediaan SDM guru yang kualified, laboratorium /bengkel kerja dan hardware lain, tetapi juga perubahan sikap teologis dan budaya. Bukan rahasia lagi, bahwa paham teologis yang dominan pada kalangan ummat Islam masih cenderung meminggirkan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan sains dan teknologi, karena secara epistemologis dianggap tidak atau kurang sah, karena sains dan teknologi merupakan politik rasio dan pengujian empiris. Lebih jauh, budaya sains dan teknologi masih kurang mendapat tempat dalam masyarakat kita

umumnya; tingkat melek-apalagi budaya – komputer, bisa diduga, masih sangat rendah dalam masyarakat kita umumnya, wabil khusus dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya.

Tetapi sekali lagi mengambil keseluruhan pilihan jenis pendidikan ini jelas mengandung berbagai kesulitan dan dilema tertentu bagi lembaga pendidikan yang memiliki pretensi ke arah tersebut. Kesulitan itu terletak bukan hanya pada keterbatasan kapasitas kelembagaan institusi-institusi pendidikan Islam umumnya, tetapi juga karena masih lemahnya SDM yang qualified dalam proses pembelajaran, dan keterbatasan keterbatasan lainnya. Karena itu langkah yang paling realistis adalah mengambil satu atau dua pilihan itu, sementara sedikit banyak berusaha mengakomodasi pilihan-pilihan lainnya.

Kedua, berkaitan dengan masalah pertama diatas adalah persoalan identitas diri lembaga pendidikan Islam tertentu. Pada satu segi, pengakuan atas dan penyeteraan pendidikan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam telah membuka berbagai peluang bagi penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan Islam. Tetapi pengambilan pilihan-pilihan tadi sangat bisa jadi dapat mengorbankan identitas pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana telah terpatrit di dalam masyarakat. Di sini terjadi “perbenturan” antara “social expectations” dengan “academic expectations” yang disinggung diatas. Dan hal ini, terjadi khususnya di pesantren. Keterlibatan pesantren dalam program non kependidikan seperti pengembangan pesantren sebagai pusat koperasi, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi pedesaan, pusat penyelamatan lingkungan hidup, puast

pengembangan HAM dan demokrasi, dan sebagainya juga dapat mengeburkan identitas pesantren.

Lebih jauh paradigma baru pendidikan nasional juga sangat menekankan kenyataan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya merupakan “pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) selama berabad-abad. Pada satu segi, pengakuan ini merupakan perkembangan yang sangat positif, khususnya menyangkut orientasi eksistensi pendidikan Islam itu sendiri, tetapi, pada segi lain, pengakuan itu secara implisit menuntut peran lebih besar masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat kini dituntut tidak hanya mendirikan bangunan fisik dan perangkat-perangkat pokok lembaga pendidikan Islam, tetapi lebih-lebih lagi dalam mengembangkannya menjadi pendidikan yang berkualitas (quality education) untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki – setidaknya – dasar-dasar- “keunggulan kompetitif tersebut. Di sini, masyarakat pendukung pendidikan Islam diharapkan dapat menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung yang lebih memadai bagi terselenggaranya pendidikan yang mampu mendorong penanaman dasar-dasar keunggulan kompetitif tersebut.

Ketiga, penguatan kelembagaan dan manajemen. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan nasional–misalnya yang menekankan pada peran lembaga pendidikan Islam sebagai “*community based education*” dan tantangan global mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat dan memberdayakan kelembagaannya. UU. Yayasan juga menghendaki lembaga-lembaga pendidikan

Islam untuk meninjau dan merumuskan kembali kelembagaannya dengan para pelaksana kependidikan; madrasah dan atau sekolah. Kelembagaan kependidikan Islam haruslah bertolak pada prinsip-prinsip kemandirian (otonom), profesionalitas, akuntabilitas dan kredibilitas.

Dalam mewujudkan quality education, yayasan (atau bahkan perseroan terbatas) yang menjadi pemilik lembaga-lembaga pendidikan seyogyanya memberikan ruang gerak lebih besar kepada para pelaksana pendidikan, khususnya kepala madrasah atau kepala sekolah agar :

Pertama, dapat mengorganisasi dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk memberikan dukungan yang memadai bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang maksimal, bahan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik.

*Kedua*, dapat berkomunikasi secara teratur dengan pemilik lembaga (dan atau yayasan) guru, staff, orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah setempat. Selanjutnya, pesantren sudah waktunya dikelola dengan manajemen modern sehingga pendidikan yang diselenggarakannya dapat lebih efisien dan efektif. Prinsip modern seperti “Total Quality Management” (TQM) atau “Corporate Good Governance” yang sudah mulai diterapkan pada sementara lembaga-lembaga pendidikan lain, agaknya dapat pula mulai dikaji dilingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jajat Burhanudin. *Mencetak Muslim Modern: Prakata Azyumardi Azra* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006) 16